

“Kami Memiliki Pendekatan Terintegrasi”

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur yang menjadi program kerja pemerintah jelas membutuhkan dana yang besar sehingga diperlukan partisipasi BUMN dan swasta. Guna menarik investasi swasta, saat ini pemerintah mengandalkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang dijalankan oleh Bappenas. Sejauh mana skema ini efektif menarik swasta dalam pembangunan infrastruktur?

Bisnis berkesempatan mewawancarai Ekoputro Adijayanto, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang baru ditunjuk sebagai CEO PINA, Rabu (22/11). Berikut petikannya.

Apa yang melatarbelakangi pembentukan PINA?

PINA itu ada karena ada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional. Di dalam salah satu pasal dinyatakan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi koordinator pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah.

Secara politis, Presiden sebagai pemimpin negara kita, ingin sekali negara kita maju dan memiliki daya saing yang tinggi dengan negara lain sehingga pemerataan pembangunan itu ada.

Sekarang gejala di dunia itu yang namanya anggaran makin lama makin sedikit. Jadi, memang swasta di sini non-BUMN. BUMN pun kalau sudah menjadi anak perusahaan dari BUMN sebenarnya sudah swasta, tapi yang ingin kita dorong benar-benar swasta seperti Medco, Astratel, Adaro. Kita ingin dorong lebih jauh. Sebagian besar dari mereka semua itu sangat likuid modalnya dari sisi *cash flow*, tetapi mereka mungkin sulit mendapatkan proyek infrastruktur.

Benarkah salah satu faktor penyebabnya adalah dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur?

Ya, memang waktu Presiden di acara Kadin, ada keluhan dari pengusaha mengenai hal itu. Dan kita sebenarnya ingin menjembatani hal itu. Kita dari PINA ini sudah dari awal

mendorong peran swasta, sifatnya *business to business*.

Ada pendekatan yang namanya stok infrastruktur, yaitu jumlah infrastruktur yang ada di satu negara dibandingkan dengan jumlah GDP [*gross domestic product*]. Stok infrastruktur kita turun terus. Sebelum [tahun] 97—98 kan masa-masa reformasi, peralihan dari Orde Baru ke reformasi, itu masih 49%. Lalu turun menjadi 38%, sedangkan negara lain standar globalnya 70%.

Mengapa pemerintah sampai harus memfasilitasi investasi proyek yang sifatnya b-to-b? Apa yang diharapkan dari terbentuknya PINA?

Selama ini kita *roadshow* hanya untuk jualan *government bonds*, tetapi sekarang kita jualan infrastruktur. Peminatnya luar biasa besar. Saya *surprise* banyak orang yang tidak tahu Indonesia kondisinya seperti apa sekarang, terutama di bidang infrastruktur. Keputusan investasi di infrastruktur tidak serta merta. Kita harus kirim *email* kasih *update* lagi. Nah, siapa yang melakukan hal ini secara kontinu?

Setelah era demokrasi, banyak investor yang datang ke Indonesia dan bingung harus bertanya ke siapa kalau mereka mau investasi karena setiap instansi bergerak, terlalu banyak pintu. PINA mencoba menerobos hal itu, membangun ekosistem.

Apa yang menjadi ruang lingkup PINA? Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menjalankan misi membangun ekosistem infrastruktur?

Kami memiliki pendekatan terintegrasi, mulai dari membuat inovasi finansial, menggandeng sektor swasta baik domestik dan luar negeri, memobilisasi dana jangka panjang, fasilitasi dan advokasi pemangku kepentingan untuk mempercepat *financial close*, koordinasi yang kuat di level kebijakan dan implementasi, hingga meningkatkan kesiapan dan *pipeline* proyek. Persiapan proyek di Indonesia ini masih menjadi masalah tersendiri. Di Indonesia orang bingung kenapa kok, banyak duit banyak beredar di seluruh dunia termasuk dalam negeri sendiri kok, proyeknya susah? Kami juga lakukan *roadshow*. Kami cerita *rating* kita cukup baik, begitu ditanya investor proyeknya mana?

Kita lihat-lihatan kebingungan.

Nah, waktu kami *roadshow* ke mana-mana sekarang, sudah beda. Kami bawa proyek yang sudah *ready*. Lengkap kami cantumkan kepada siapa mereka harus menghubungi, bagaimana caranya untuk masuk, dan sebagainya. Ini memang satu pekerjaan rumah yang besar, di luar koordinasi yang tadi saya bilang.



Ekoputro Adijayanto